

Peran Pendidikan dalam Membentuk Masyarakat yang Beradab

(Telaah Kritis Teori Perubahan Sosial)

Oleh : Yusuf Arisandi, M.Pd.I

Abstraksi

Pendidikan merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena hanya dengan pendidikanlah kita mampu untuk menerjemahkan nilai-nilai, gagasan, sikap dan tindakan sosial yang mencerminkan kehidupan yang bermoral dan bermartabat. Tanpa pendidikan kita tidak bisa menjadi manusia yang beradab. Dengan pendidikan manusia dapat mengembangkan segala potensinya untuk menjadi manusia yang cerdas dan beradab. Untuk mewujudkan masyarakat yang beradab, penulis menggunakan teori Perubahan Sosial sebagai pisau bedahnya. Pada teori tersebut akan dijelaskan bagaimana pendidikan dapat mempengaruhi individu dalam masyarakat yang nantinya akan memberikan efek pada perubahan teknologi, perilaku, sistem sosial, dan norma. Pada intinya teori Perubahan Sosial memberikan asumsi bahwa setiap masyarakat berpotensi untuk berubah, baik perubahan tersebut bersifat positif ataupun negatif. Melalui peran pendidikan inilah diharapkan masyarakat bisa berubah menjadi masyarakat yang beradab.

Kata Kunci : Pendidikan, Masyarakat yang Beradab

A. Pendahuluan

Pendidikan adalah hal yang paling vital dalam segala aspek kehidupan manusia. Aspek kehidupan manusia yang lain tidak akan sempurna tanpa dibarengi unsur pendidikan. Misalnya, suatu bangsa ingin menciptakan perekonomian bangsa yang baik, maka butuh pendidikan ekonomi untuk mewujudkan impian itu. Hal ini juga berlaku untuk aspek kehidupan yang lainnya. Bahkan saking pentingnya, pendidikan ini bisa dijadikan barometer peradaban suatu bangsa. Bangsa yang peradabannya maju adalah bangsa yang benar-benar memperhatikan aspek pendidikan. Misalnya Jepang. Sejak 2 kota besar di Jepang, yaitu Nagasaki dan Hiroshima dibom atom oleh sekutu, maka yang pertama kali dipikirkan oleh pemerintah Jepang adalah bukan persoalan berapa besar kerugian yang menimpa Jepang, tetapi berapa banyak guru yang masih hidup. Karena dari Guru inilah sumber kebangkitan dimulai kembali. Dari Guru inilah terlahir jutaan orang-orang cerdas. Dari Guru inilah peradaban maju bisa terbentuk. Ini adalah bukti bahwa Jepang lebih memprioritaskan pendidikan dari pada lainnya. Saat ini, Jepang termasuk negara yang maju di dunia.

Contoh lain adalah peradaban Islam. Berbicara soal historisasi peradaban, Islam pernah mengalami masa kejayaan yang tak tertandingi pada masa itu, yaitu peradaban pada masa bani Abbasiyah (132 H-656 H / 750 M-1258 M) di Baghdad dan pada masa Bani Umayyah di Spanyol (711-1492 M). Keduanya adalah aset Islam yang paling berharga karena dari situlah terlahir cendekiawan-cendekiawan muslim yang sangat fenomenal pada masa itu, misalnya yang di Baghdad ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafii, Imam Ahmad bin Hanbal, Ibn Sina, al-Khawarizmi, al-Farabi, dan sebagainya. Belum lagi yang di Spanyol, ada Ibn Rusyd, Ibn Bajjah, Ibn Thufail, Ibn Bathutah, Ibn Khaldun dan sebagainya. Kesemua cendekiawan muslim itu muncul karena dilatarbelakangi sang khalifah yang cinta akan ilmu dan pendidikan. Kedua negara ini mempunyai kontribusi yang penting dalam membangun peradaban Islam di wilayah timur dan barat. Bahkan kedua negara ini pernah menjadi kiblatnya orang-orang Eropa yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuannya.

Dari contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa pendidikan mempunyai pengaruh yang sangat signifikan dalam membentuk peradaban bangsa. Oleh karena itu, Pendidikan dan adab adalah dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Pendidikan adalah alatnyanya sedangkan adab adalah tujuan akhirnya.

B. Definisi Pendidikan

Secara etimologis, kata “pendidikan” berasal dari kata dasar “didik”. Dalam bahasa Inggris “*to educate*” atau “*education*”. Dalam bahasa Arab kita kenal dengan istilah *rabba-yurabbi-tarbiyah* yang berarti meningkatkan, menumbuhkan dan mendidik. Term lain dari kata *tarbiyah* adalah *ta’lim* dan *ta’dib*, keduanya mempunyai makna yang hampir sama. Sedangkan secara terminologis, banyak para ahli pendidikan yang mendefinisikan makna pendidikan, diantaranya adalah :

1. Ki Hajar Dewantara

Pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak dengan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.

2. Ibnu Muqaffa (salah seorang tokoh bangsa Arab yang hidup tahun 106-143 H, pengarang Kitab Kalilah dan Daminah)

Pendidikan adalah apa yang kita butuhkan untuk mendapatkan sesuatu yang akan menguatkan semua indera kita seperti makanan dan minuman, dengan yang lebih kita butuhkan untuk mencapai peradaban yang tinggi yang merupakan santapan akal dan rohani.

3. Menurut UU No. 20 tahun 2003

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

4. Menurut UU No. 2 tahun 1989

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.

5. Muhammad Naquib al-Attas

Pendidikan itu berkaitan dengan dasar-dasar filsafat pendidikan, yang pada umumnya berkisar pada pemikiran tentang Tuhan, manusia, masyarakat, alam, ilmu dan akhlaq mulia.¹

6. Ibn Khaldun

Pendidikan itu harus berangkat dari pandangan bahwa Allah menciptakan persepsi yang bermanfaat bagi manusia untuk berfikir dan memperoleh pengetahuan ilmiah.²

7. Ibn Sina

Menurut Ibn Sina, tujuan pendidikan adalah untuk menggapai ridlo Allah SWT (*“education is directed toward Allah”*), keuntungan materi tidak memiliki nilai apalagi dijadikan tujuan.³

8. Seyyed Hossein Nasr

Menurut Seyyed Hossein Nasr, tujuan pendidikan Islam bukan untuk tujuan memperoleh kebahagiaan di dunia, namu untuk kebahagiaan di Kampung Abadi, yaitu Alam Abadi (Akhirat).

9. Azzumardi Azra

Menurut Azzumardi Azra, pendidikan merupakan suatu proses penyiapan generasi muda untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara lebih efektif dan efisien.⁴

C. Definisi Masyarakat yang Beradab

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, masyarakat adalah pergaulan hidup manusia (sehimpunan orang yang hidup bersama di suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan tertentu).⁵ Sedangkan menurut para ahli, pengertian masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Menurut R.M Maclver dan Charles H.Page, mengartikan masyarakat sebagai suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antar berbagai kelompok dan penggolongan, dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia.⁶

¹ Abuddin Nata, *Pemikiran Pendidikan Islam dan Barat*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2013),Cet.II, hal. 337

² Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), hal. 742

³ Fatemah Zibakalam-Mofrad, *Ibn Sina's Philosophy of Education and its Application to Modern Muslim Educational System*, hal. 66

⁴ Azzumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, (Ciputat : Kalimah, 2001), hal. 3

⁵ W.J.Spoerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), cet.XII, hal. 636.

2. Menurut Ralph Linton, masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerjasama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.⁷
3. Menurut Murtadha Muthahhari, masyarakat terdiri atas kelompok-kelompok manusia yang saling terkait oleh sistem-sistem, adat istiadat, ritus-ritus serta hukum-hukum khas dan yang hidup bersama. Kehidupan bersama ialah kehidupan yang di dalamnya kelompok-kelompok manusia hidup bersama-sama di suatu wilayah tertentu dan sama-sama berbagi iklim serta makanan yang sama.⁸
4. Menurut Quraish Shihab, masyarakat adalah kumpulan sekian banyak individu kecil atau besar yang terikat oleh satuan adat, ritus atau hukum khas, dan hidup bersama.⁹
5. Menurut Muhammad Husaini Bahesyti dan Jawad Bahonar, masyarakat adalah kelompok orang yang hidup saling berhubungan, karena adanya keinginan dan kepentingan yang sama, dan untuk mewujudkannya mereka saling bekerja sama.¹⁰
6. Menurut Astrid S. Susanto, masyarakat adalah yang di dalamnya terdapat unsur sekelompok orang yang saling berinteraksi dan berkomunikasi, karena ada tujuan yang ingin diwujudkan bersama, yaitu terpenuhinya berbagai kebutuhan hidup : pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya, aturan yang disepakati bersama, kerja sama; dan terdapat pula unsur tempat tinggal yang sama, sistem hubungan antar manusia, perasaan solidaritas, (sense of sharing), perasaan membagi sesuatu bersama, sadar akan interdependensi satu sama lain, norma-norma dan kebudayaan.¹¹

Sedangkan makna kata beradab, berasal dari kata *adaba* yang berarti kesopanan, keramahan, dan kehalusan budi pekerti¹² atau berasal dari kata *addaba* yang berarti menanamkan adab yang terdiri dari ilmu dan akhlaq. Makna ini mempunyai padanan kata dengan akhlaq. Sehingga ketika ada orang yang tidak beradab, maka sama maknanya dengan tidak berakhlaq, tidak sopan, tidak ramah ataupun tidak mempunyai budi pekerti yang luhur. Jika dikaitkan dengan dunia sastra, kata adab

⁶ R.M. Maclver dan Charles H. Page, *Society: An Introductory Analysis* (New York: Macmillan & Co. Ltd, 1961), hal. 5

⁷ Ralph Linton, *The Study of Man : An Introduction* (New York: Crofts Inc, 1963), hal. 91.

⁸ Murtadha Muthahhari, *Masyarakat dan Sejarah*, (terj.) M. Hashem dari judul asli *Society and History*, (Bandung: Mizan, 1996), cet. I, hal. 15

⁹ H.M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1996), cet. II, hal. 319

¹⁰ Muhammad Husaini Bahesyti dan Jawad Bahonar, *Intisari Islam Kajian Komprehensif tentang Hikmah Ajaran Islam*, (terj.) Ilyas Hasan dari judul *Philosophy of Islam*, (Jakarta : Lentera Basritama, 1424 H / 2003 M). Cet. I, hal. 441.

¹¹ Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Binacipta, 1979), hal. 19.

¹² Ibn Mandzur, *Lisan al-Árabi* entri a-da-ba dan Ibrahim Mustofa (dkk) *al-Mu'jam al-Wasith* entri adaba (Istanbul : Maktabah al-Islamiyah, 1380 H/1960 M)

mempunyai makna pengetahuan tentang hal-hal indah yang mencegah dari kesalahan-kesalahan.¹³ Sehingga Sastrawan disebut juga adib yang berarti orang yang mempunyai pengetahuan-pengetahuan tertentu yang membebaskan dirinya dari kesalahan-kesalahan. Menjadi pribadi yang beradab / berakhlaqul karimah ini sangat penting karena ini menjadi salah satu misi utama Rasulullah SAW, sebagaimana sabdanya :

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

Artinya : Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlaq (HR. Baihaqi)

Kalau kedua kata tersebut digabungkan, maka menjadi masyarakat yang beradab yang artinya masyarakat yang mempunyai pengetahuan yang tinggi dan berakhlaqul karimah. Masyarakat beradab dalam terminologi al-Qur'an bisa disebut masyarakat yang berilmu pengetahuan dan Allah SWT membedakan masyarakat yang berilmu pengetahuan dan yang tidak berilmu pengetahuan, sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. Az-Zumar : 9

أَمَّنْ هُوَ قَنِيتُ ءِآنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا تَحَذِرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾

Artinya : (apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.

D. Sifat dan Karakter Masyarakat

Masyarakat pada hakikatnya merupakan ikatan dari sejumlah individu, sehingga sifat dan karakter masyarakat tersebut tergantung pada sifat dan karakter masing-masing individu. Masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang beriman, bertaqwa, berakhlaq mulia, berilmu pengetahuan, berperadaban, berkebudayaan, dan memiliki keunggulan dalam bidang ilmu dan teknologi, akan menyebabkan masyarakat tersebut menjadi masyarakat yang beradab dan berbudaya.

Keadaan masyarakat juga sama dengan keadaan jiwa manusia, yaitu ada jiwa yang masih belum matang dan dewasa (bersifat kekanak-kanakan) dan ada pula jiwa yang sudah matang dan dewasa.

¹³ Kemas Badruddin, *Filsafat Pendidikan*, Analisis Pemikiran Syed Naquib al-Attas, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 59

Begitupun juga dengan masyarakat. Ada masyarakat yang masih sederhana atau primitif, belum mengalami kemajuan, hidup masih dalam keadaan sederhana dalam segala aspeknya dan ada pula masyarakat yang sudah mengalami kemajuan dan berperadaban tinggi.

Imam Ghazali membagi masyarakat menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok masyarakat awam dan khawas. Kelompok masyarakat awam harus dihadapi dengan cara memberikan ajaran berupa nasihat. Sedangkan kelompok masyarakat khawas, yang sudah berpikiran maju harus dihadapi dengan memberikan hikmah, yaitu ajaran yang mengandung nilai-nilai luhur. Pendapat Imam Ghazali ini mengacu pada Firman Allah SWT yang berbunyi :

Sehubungan dengan sifat dan karakter masyarakat yang demikian itu, maka perlu adanya program yang berkaitan dengan pembinaan masyarakat agar menjadi masyarakat yang berkebudayaan dan berperadaban tinggi. Upaya tersebut hanya bisa dilakukan dengan program pendidikan. Pada sisi yang lain, keadaan masyarakat yang berbudaya dan berperadaban tinggi tersebut akan memberikan pengaruh positif bagi kemajuan pendidikan. Dengan demikian, antara masyarakat dan pendidikan terjadi proses saling mempengaruhi.¹⁴

E. Peran dan Fungsi Masyarakat

Kehadiran masyarakat dan individu sesungguhnya saling membutuhkan. Masyarakat tercipta karena adanya individu yang saling berinteraksi dan berkomunikasi antara satu dan lainnya; dan adanya masyarakat pada gilirannya juga akan mempengaruhi keberadaan individu. Terkait fungsi masyarakat terhadap individu dapat dikemukakan sebagai berikut, Pertama membantu individu dalam memenuhi berbagai kebutuhan bagi kelangsungan hidupnya, yakni sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lainnya. Kedua, membantu individu dalam bersosialisasi, yakni belajar bermasyarakat dalam bentuk saling mengenal, bergaul, meminta bantuan, saran, pemikiran, dan gagasan lainnya. Ketiga, sebagai tempat melakukan proses pembelajaran dalam bentuk *learning by doing*, yakni belajar sambil bekerja, sehingga daya cipta, rasa dan karsanya akan terbina dengan baik. Di dalam masyarakat terdapat pola komunikasi dan interaksi, struktur sosial, lapisan sosial, budaya, kepemimpinan, integrasi, organisasi, dan lain sebagainya. Berbagai hal yang demikian itu jika dikaji secara seksama akan melahirkan berbagai teori tentang ilmu-ilmu sosial.

¹⁴ Abuddin Nata, *Ibid*, hal. 159-160

Keempat, tempat memenuhi kebutuhan sosialnya, yakni kebutuhan untuk mendapatkan teman, sahabat, dan pasangan hidupnya.¹⁵

F. Pendidikan Berbasis Masyarakat

Masyarakat dengan berbagai komponennya itu menjadi sebuah kekuatan, faktor dan pilar yang mendukung pendidikan, baik dalam tingkat teoritis maupun praksis. Pemikiran ini didasarkan pada berbagai pertimbangan sebagai berikut :

Pertama, di dalam Rencana Strategis Pendidikan Nasional 2005-2009 dinyatakan bahwa visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.¹⁶ Dalam visi tersebut terlihat adanya keinginan untuk menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. Pembentukan masyarakat yang demikian itu juga diikuti oleh proses transformasi kultural, yang menandai suatu perubahan dari masyarakat yang potensi kemanusiaannya kurang berkembang menuju masyarakat maju dan berkembang yang mampu mengaktualisasikan potensi kemanusiaannya secara optimal.

Kedua, bahwa misi pendidikan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan, adalah : 1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh warga masyarakat Indonesia; 2) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; 3) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; 4) Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan 5) memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia¹⁷ . Di dalam misi pendidikan nasional ini terlihat dengan jelas kuatnya pengaruh perkembangan masyarakat terhadap pendidikan.

¹⁵ Abuddin Nata, *ibid*, hal. 162

¹⁶ Lihat Departemen Pendidikan Nasional, Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009 menuju Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang 2025, (Jakarta:Depdiknas, 2005), hal. 8

¹⁷ Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Ibid*, hal.10

Ketiga, di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mewujudkan kehidupan bangsa yang beriman, bertaqwa, berakhlaq mulia, serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab.

Keempat, di dalam kurikulum pendidikan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas :

- a. Kelompok mata pelajaran agama dengan akhlaq mulia.
- b. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.
- c. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d. Kelompok mata pelajaran estetika.
- e. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, kesehatan dan kesenian.¹⁸

Berbagai macam mata pelajaran yang terdapat pada kurikulum tersebut diarahkan pada upaya menghasilkan manusia yang dapat hidup di tengah-tengah masyarakat, yaitu manusia yang selain memiliki kemantapan iman dan akhlaq mulia, juga manusia yang berkepribadian Indonesia, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki rasa seni, serta sehat jiwa raganya.

Kelima, proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan agar diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dapat meningkatkan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik.¹⁹ Di dalam rumusan proses pembelajaran ini terdapat sikap dan respon dunia pendidikan untuk memperlakukan masyarakat secara manusiawi, adil, demokratis, egaliter dan bebas terkendali. Proses pembelajaran yang demikian itu terjadi karena masyarakat saat ini semakin cerdas dan kritis, serta ingin diperlakukan secara manusiawi, adil, demokratis dan egaliter. Hal ini berbeda dengan perlakuan yang diberikan pendidikan pada zaman penjajahan yang lalu. Pendidikan pada masa itu cenderung menjadikan masyarakat sebagai objek yang harus tunduk dan patuh pada kehendak sekolah. Peran guru pada masa lalu sangat dominan, bahkan terkadang otoriter.

¹⁸ Lihat Peraturan Pemerintah Nomer 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2005), hal. 9

¹⁹ Lihat Peraturan Pemerintah Nomer 19 Tahun 2005, *Ibid*, hal. 19

Keenam, bahwa pengelolaan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.²⁰ Pengelolaan pendidikan yang demikian, dengan jelas memperlihatkan semakin besarnya peran serta sekolah dan masyarakat dalam ikut serta mengelola pendidikan. Masyarakat harus dilibatkan agar menjadi mitra dalam pengelolaan pendidikan. Ketentuan ini dapat dilihat dari keharusan adanya komite sekolah atau majlis madrasah pada setiap satuan pendidikan, yang di dalamnya terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan lain sebagainya.

Ketujuh, di era globalisasi saat ini, pendidikan sering dilihat sebagai sebuah komoditas yang diperdagangkan dan tunduk pada hukum *supply and demand*, yakni penyediaan barang dan permintaan pasar. Jika permintaannya tinggi, maka harga naik. Sebaliknya jika permintaan berkurang, maka harga barang akan turun. Agar dapat mempertahankan kelangsungan kegiatan pendidikan tersebut, maka harus selalu memperhatikan tuntutan permintaan, yang dalam hal ini adalah kecenderungan masyarakat. Untuk mengetahui seberapa jauh masyarakat membutuhkan hal tersebut, maka setiap saat harus dilakukan evaluasi terhadap harapan dan permintaan masyarakat.

Kedelapan, bahwa di dalam masyarakat, sebagaimana dikemukakan di atas, terdapat prinsip-prinsip, hukum dan nilai-nilai yang menjadi dasar bagi tegak dan kokohnya masyarakat tersebut. Prinsip-prinsip, hukum dan nilai-nilai tersebut adalah berpegang teguh pada tauhid, yakni memercayai Tuhan dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, menghiasi diri dengan akhlaq mulia, dan kepribadian utama, ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, saling menghormati, saling menghargai, saling tenggang rasa, saling tolong-menolong, saling mengamankan, saling melindungi, saling memaafkan, seimbang antara kepentingan individu dan sosial, terbuka, dinamis, kreatif dan inovatif. Dengan prinsip-prinsip, hukum, dan nilai-nilai tersebut, maka dapat diwujudkan keadaan masyarakat yang madani, masyarakat yang berbudaya dan berperadaban, dan masyarakat yang utama. Keadaan masyarakat yang demikian itu merupakan lingkungan yang amat kondusif untuk mendukung keberhasilan pendidikan; keadaan masyarakat yang demikian itu merupakan tempat untuk melakukan proses sosialisasi dan pembelajaran bagi peserta didik.

²⁰ Lihat Peraturan Pemerintah Nomer 19 Tahun 2005, *Ibid*, hal. 38

Kesembilan, bahwa di dalam masyarakat juga terdapat kebudayaan, organisasi, dan sistem kepemimpinan. Semua ini merupakan unsur-unsur yang diperlukan dalam mendukung kegiatan pendidikan.²¹

G. Konsep Perubahan Sosial

Setiap saat masyarakat selalu mengalami perubahan. Tidak mungkin kita menjumpai suatu masyarakat yang tidak berubah sama sekali (statis). Baik perubahan itu besar atau kecil, cepat atau lambat, serta direncanakan atau tidak direncanakan. Yang pasti perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat itu adalah keniscayaan. Sebagai contoh, ketika ada anak kampung yang ingin melanjutkan studi ke Mesir selama kurang lebih 4 tahun lamanya. Dia tidak pernah pulang ke kampung halamannya karena dia harus segera menyelesaikan kuliahnya sambil bekerja. Setelah lulus kuliah, dia pulang ke kampung halamannya. Disana dia pasti akan menemukan banyak perubahan yang terjadi, baik itu perubahan tatanan masyarakatnya, infrastrukturnya dan lain sebagainya.

Contoh lain adalah dahulu keluarga berfungsi sebagai sumber pengetahuan (pendidikan), keterampilan dan sumber ekonomi. Namun zaman sekarang fungsi-fungsi tersebut sudah mulai bergeser. Anak-anak tidak hanya memperoleh pengetahuan dari keluarga saja, tetapi juga dari media massa, televisi, radio, koran dan internet (gadget).²² Sebagai keluarga kita harus bijak menyikapi hal ini, agar perubahan yang terjadi pada anak-anak kita mengarah ke hal-hal yang positif bukan malah sebaliknya. Disinilah peran pendidikan dibutuhkan untuk menyiapkan generasi yang mampu menjawab tantangan zaman agar peka terhadap perubahan dengan tetap mengedepankan pada akhlak yang baik.

Menurut teori Sosiologi Pendidikan yang dikemukakan oleh Wilbur B. Brookover, bahwa perubahan masyarakat yang disebut *social order* terjadi dalam empat fase, yaitu :

Fase pertama, masyarakat tidak mau mengalami perubahan yang datang, baik dipaksakan atau datang mempengaruhinya. Semua perubahan yang datang akan ditolak, karena masyarakat ini berpegang teguh pada norma yang ada yang dianggap baik dan melindungi mereka dari bencana. Bagi masyarakat tersebut, perubahan merupakan faktor yang merusak tatanan kehidupan sosial. Bila terjadi perubahan, justru akan menimbulkan kegoncangan dan konflik dalam masyarakat, sehingga akan terjadi ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Pada kelompok ini, pendidikan tidak bisa

²¹ Abuddin Nata, *Ibid*, hal. 162-167

²² Ali Maksum, *Sosiologi Pendidikan*, (Malang : Madani), hal. 158

berkembang dan bersifat *status quo*, dimana masyarakat berusaha mengekalkan tradisi dan keadaan yang sudah ada.

Fase kedua, masyarakat mengalami kebimbangan dalam menerima perubahan. Masyarakat ini hanya menerima perubahan bila tidak bertentangan dengan kebudayaan mereka. Bahkan jika perubahan yang datang dapat mengokohkan budaya mereka, maka budaya dan perubahan itu akan mereka adopsi.

Fase ketiga, masyarakat sudah mulai menerima perubahan sosial, sehingga mereka mempersiapkan generasi penerus mereka melalui pendidikan. Dengan demikian, perubahan yang akan dilakukan telah direncanakan terlebih dahulu, bahkan dapat dipercepat melalui proses pendidikan. Bagi masyarakat yang berada pada fase ketiga (*social order*), peranan pendidikan sangat penting bagi mereka, karena "*education as an agency of change*". Maka lembaga-lembaga pendidikan akan memberikan berbagai pengalaman kepada peserta didik dan masyarakatnya, baik ilmu, teknologi maupun keterampilan untuk menghadapi masa depan.

Fase keempat, masyarakat telah mengalami kemajuan yang sangat tinggi, sehingga dikelompokkan ke dalam masyarakat yang sudah *established*, yaitu kelompok masyarakat yang sudah mapan dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan sehingga tidak disibukkan oleh masalah-masalah kecil, seperti kesehatan, penyakit menular, kemiskinan atau perumahan.²³

Secara garis besar anggota masyarakat dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Kelompok masyarakat yang bersikap statis, yaitu yang selalu ingin mempertahankan yang sudah lama. Orang-orang yang semacam ini tidak mau melihat adanya perubahan di dalam masyarakat tempat hidupnya. Jika ada sesuatu yang baru selalu saja mereka ingin menolaknya.
2. Kelompok masyarakat yang bersikap dinamis, yaitu yang menghendaki adanya hal-hal yang baru dan maju. Mereka ini termasuk orang yang kreatif dan dinamis, yang ingin memajukan cara hidup, ingin kemakmuran dan kesejahteraan.²⁴

Kelompok kedua inilah yang akan menjadi agen pembangunan masyarakat dan pendorong masyarakat untuk maju. Oleh karena itu, tugas pendidikan mencetak individu anggota masyarakat

²³ Wilbur B. Brookover, *Sociological Education* (New York : American Book Company, 1995), hal. 37-78

²⁴ Abu Ahmadi, et. al, *Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal. 227

yang memiliki kecenderungan untuk maju, berpikir kreatif, dinamis dan inovatif, sehingga mereka dapat menjadi agen pembangunan masyarakat bangsanya.

H. Teori-Teori Perubahan Sosial

Perubahan sosial dalam masyarakat terjadi karena adanya interaksi sosial antar individu dalam masyarakat maupun antar masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Hal tersebut didasari karena adanya perubahan unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, seperti perubahan unsur-unsur geografis, biologis, ekonomis, dan kebudayaan. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan zaman yang ada. Adapun teori-teori yang menjelaskan tentang perubahan sosial adalah sebagai berikut.

1. Teori Evolusi (Evolution Theory)

Perubahan evolusi adalah perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam proses lambat, dalam waktu yang cukup lama dan tanpa ada kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan.²⁵ Perubahan-perubahan ini berlangsung mengikuti kondisi perkembangan masyarakat, yaitu sejalan dengan usaha-usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.²⁶ Dengan kata lain, perubahan sosial terjadi karena dorongan dari usaha-usaha masyarakat guna menyesuaikan diri terhadap kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan perkembangan masyarakat pada waktu tertentu.

Teori ini pada dasarnya berpijak pada perubahan yang memerlukan proses yang cukup panjang. Dalam proses tersebut, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Contoh, perubahan sosial dari masyarakat agraris ke masyarakat industri.

Ada bermacam-macam teori tentang evolusi. Menurut Soekanto, teori tersebut digolongkan ke dalam tiga teori, yaitu :

a. Uni linier Theories of Evolution

Teori ini berpendapat bahwa manusia dan masyarakat termasuk kebudayaannya akan mengalami perkembangan sesuai dengan tahapan-tahapan tertentu dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang kompleks dan akhirnya sempurna. Pelopor teori ini adalah Auguste Comte dan Herbert Spencer.

²⁵ Charles F. Andrian, *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), hal. 34.

²⁶ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hal. 10-36

b. Universal Theories of Evolution

Teori ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahap-tahap tertentu yang tetap. Kebudayaan manusia telah mengikuti suatu garis evolusi tertentu. Menurut Herbert Spencer, prinsip teori ini menyatakan bahwa masyarakat hasil perkembangan dari kelompok homogen menjadi kelompok yang heterogen.

c. Multilined Theories of Evolution

Teori ini lebih menekankan pada penelitian terhadap tahap-tahap perkembangan tertentu dalam evolusi masyarakat. Misalnya mengadakan penelitian tentang perubahan sistem mata pencaharian dari sistem berburu ke sistem pertanian menetap dengan menggunakan pemupukan dan pengairan.²⁷

2. Teori Konflik (Conflict Theory)

Menurut pandangan teori ini, pertentangan atau konflik bermula dari pertikaian kelas antara kelompok yang menguasai modal atau pemerintahan dengan kelompok yang tertindas secara materiil, sehingga akan mengarah pada perubahan sosial. Teori ini memiliki prinsip bahwa konflik sosial dan perubahan sosial selalu melekat pada struktur masyarakat.

Teori ini menilai bahwa sesuatu yang konstan atau tetap adalah konflik sosial bukan perubahan sosial. Karena perubahan merupakan akibat dari adanya konflik tersebut. Karena konflik berlangsung terus-menerus, maka perubahan juga akan mengikutinya. Dua tokoh yang pemikirannya menjadi pedoman dalam teori konflik ini adalah Karl Marx dan Ralf Dahrendorf.

Secara terperinci, pandangan teori konflik lebih menitikberatkan pada hal berikut ini :

- a. Setiap masyarakat terus menerus berubah.
- b. Setiap komponen masyarakat biasanya menunjang perubahan masyarakat.
- c. Setiap masyarakat biasanya berada dalam ketegangan atau konflik.
- d. Kestabilan sosial akan bergantung pada tekanan terhadap golongan yang satu oleh golongan yang lainnya.

3. Teori Funkisional (Functionalist Theory)

²⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Press 1987), hal. 18
Jurnal Pendidikan Islam | ISSN Online: 2581-0065 Print: 2089-189X

Konsep yang berkembang dari teori ini adalah *cultural lag* (kesenjangan budaya). Konsep ini mendukung Teori Fungsionalis untuk menjelaskan bahwa perubahan sosial tidak lepas dari hubungan antara unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat. Menurut teori ini, beberapa unsur kebudayaan bisa saja berubah dengan sangat cepat sementara unsur yang lainnya tidak dapat mengikuti kecepatan perubahan unsur tersebut. Maka, yang terjadi adalah ketertinggalan unsur yang berubah secara perlahan tersebut. Ketertinggalan ini menyebabkan kesenjangan sosial (*cultural lag*).

Para penganut Teori Fungsionalis lebih menerima perubahan sosial sebagai sesuatu yang konstan dan tidak memerlukan penjelasan. Perubahan dianggap menjadi suatu hal yang mengacaukan keseimbangan masyarakat. Proses pengacauan ini pada saat perubahan itu lebih diintegrasikan dalam kebudayaan. Apabila perubahan itu ternyata bermanfaat, maka perubahan itu bersifat fungsional dan akhirnya diterima oleh masyarakat, tetapi apabila terbukti disfungsional atau tidak bermanfaat, perubahan akan ditolak. Tokoh dari teori ini adalah William Ogburn.

Secara lebih ringkas, pandangan Teori Fungsionalis adalah sebagai berikut :

- a. Setiap masyarakat relatif bersifat stabil.
- b. Setiap komponen masyarakat biasanya menunjang kestabilan masyarakat.
- c. Setiap masyarakat biasanya relatif terintegrasi.
- d. Kestabilan sosial sangat tergantung pada kesepakatan bersama (konsensus) dikalangan anggota kelompok masyarakat.

4. Teori Siklis (Cyclical Theory)

Teori ini mencoba melihat bahwa suatu perubahan sosial itu tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh siapapun dan oleh apapun. Karena dalam setiap masyarakat terdapat perputaran atau siklus yang harus diikutinya. Menurut teori ini kebangkitan kemunduran suatu kebudayaan atau kehidupan sosial merupakan hal yang wajar dan tidak dapat dihindari. Sementara itu, beberapa bentuk Teori Siklis adalah sebagai berikut :

a. Teori Oswald Spengler (1880-1936)

Menurut teori ini pertumbuhan manusia mengalami empat tahapan, yaitu : anak-anak, remaja, dewasa dan tua. Pentahapan tersebut oleh Spengler digunakan untuk menjelaskan perkembangan masyarakat, bahwa setiap peradaban besar mengalami proses kelahiran, pertumbuhan, dan keruntuhan. Proses siklus ini memakan waktu sekitar seribu tahun.

b. Teori Pitirim A. Sorokin (1889-1968)

Sorokin berpandangan bahwa semua peradaban besar berada dalam siklus tiga sistem kebudayaan yang berputar tanpa akhir. Siklus tiga sistem kebudayaan ini adalah kebudayaan ideasional, idealistis dan sensasi.

1. Kebudayaan ideasional yaitu kebudayaan yang didasari oleh nilai-nilai dan kepercayaan terhadap kekuatan supranatural.
2. Kebudayaan idealistis yaitu kebudayaan dimana kepercayaan terhadap unsur adikodrati (supranatural) dan rasionalitas yang berdasarkan fakta bergabung dalam menciptakan masyarakat ideal.
3. Kebudayaan sensasi yaitu kebudayaan dimana sensasi merupakan tolok ukur dari kenyataan dan tujuan hidup.

c. Teori Arnold Toynbee (1889-1975)

Toynbee menilai bahwa peradaban besar berada dalam siklus kelahiran, pertumbuhan, keruntuhan, dan akhirnya kematian. Beberapa peradaban besar menurut Toynbee telah mengalami kepunahan kecuali peradaban barat, yang dewasa ini beralih menuju ke tahap kepunahannya.²⁸

I. Peran dan Fungsi Pendidikan

Menurut Wuradji, pendidikan sebagai lembaga konservatif mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi sosialisasi

Pendidikan diharapkan mampu berperan sebagai proses sosialisasi dalam masyarakat bisa berjalan dengan baik. Sehingga proses sosialisasi bisa berjalan dengan wajar dan mulus. Oleh karena, orang tua dan keluarga berharap sekolah dapat melaksanakan proses sosialisasi tersebut dengan baik. Dalam lembaga-lembaga ini guru-guru di sekolah dipandang sebagai model dan dianggap dapat mengemban amanat orang tua (keluarga dan masyarakat) agar anak-anak-memahami dan kemudian mengadopsi nilai-nilai budaya masyarakatnya.

Sekolah mengemban tugas untuk melaksanakan upaya-upaya mengalihkan nilai-nilai budaya masyarakat dengan mengajarkan nilai-nilai yang menjadi *way of life* masyarakat dan bangsanya. Untuk memenuhi fungsi dan tugasnya tersebut sekolah menetapkan program dan

²⁸ Ali Maksum, *Ibid*, hal. 161-166

kurikulum pendidikan, beserta metode dan tekniknya secara pedagogis, agar proses transmisi nilai-nilai tersebut berjalan lancar dan mulus.

2. Fungsi kontrol sosial.

Pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai dan loyalitas terhadap tatanan tradisional masyarakat harus juga berfungsi sebagai lembaga pelayanan pendidikan untuk melakukan mekanisme kontrol sosial. Durheim menjelaskan bahwa pendidikan moral dapat dipergunakan untuk menahan atau mengurangi sifat-sifat egoisme pada anak-anak menjadi pribadi yang merupakan bagian masyarakat yang integral di mana anak harus memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial.²⁹

3. Fungsi pelestarian budaya masyarakat.

Pendidikan di samping mempunyai tugas untuk mempersatu budaya-budaya etnik yang beraneka ragam juga harus melestarikan nilai-nilai budaya daerah yang masih layak dipertahankan seperti bahasa daerah, kesenian daerah, budi pekerti, dan suatu upaya mendayagunakan sumber daya lokal bagi kepentingan masyarakat.

4. Fungsi latihan dan pengembangan tenaga kerja.

Dalam rangka menyiapkan tenaga kerja untuk suatu jabatan tertentu, maka dalam pendidikan akan terjadi tiga kegiatan yaitu kegiatan, latihan untuk suatu jabatan dan pengembangan tenaga kerja tertentu.

5. Fungsi seleksi dan alokasi.

Proses seleksi ini terjadi di segala bidang baik ketika masuk sekolah maupun ketika ingin masuk pada jabatan tertentu. Untuk masuk sekolah tertentu harus mengikuti ujian tertentu, untuk masuk suatu jabatan tertentu harus mengikuti testing kecakapan tertentu. Melalui hal ini, perkembangan pendidikan dapat diketahui.

6. Fungsi pendidikan dan perubahan sosial.

Fungsi pendidikan dalam perubahan sosial dalam rangka meningkatkan kemampuan peserta didik yang analisis kritis berperan untuk menanamkan keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai baru tentang cara berpikir manusia. Pendidikan pada abad modern telah berhasil menciptakan generasi baru dengan daya kreasi dan kemampuan berpikir kritis, sikap tidak mudah menyerah pada situasi yang ada dan diganti dengan sikap yang tanggap terhadap perubahan. Cara-cara berpikir dan sikap-sikap tersebut akan melepaskan diri dari ketergantungan terhadap bantuan

²⁹ Jeanne H. Ballantine, *The Sociology of Education*, (New Jersey:Prentice Hall, 1983), p.8
Jurnal Pendidikan Islam | ISSN Online: 2581-0065 Print: 2089-189X

orang lain. Dengan demikian peserta didik selain sebagai memahami perubahan dalam kehidupan sosial bisa juga sebagai agen perubahan itu sendiri.

7. Fungsi reproduksi budaya

Pendidikan berfungsi sebagai reproduksi budaya menempatkan sekolah sebagai pusat penelitian dan pengembangan. Fungsi semacam ini merupakan fungsi pada perguruan tinggi. Pada sekolah-sekolah yang lebih rendah, fungsi ini tidak setinggi pada tingkat pendidikan tinggi.

Pada masa-masa proses industrialisasi dan modernisasi, pendidikan telah mengajarkan nilai-nilai serta kebiasaan-kebiasaan baru, seperti orientasi ekonomi, orientasi kemandirian, mekanisme kompetisi sehat, sikap kerja keras, kesadaran akan kehidupan keluarga kecil, dimana nilai-nilai tersebut semuanya sangat diperlukan bagi pembangunan ekonomi sosial suatu bangsa. Usaha-usaha sekolah untuk mengajarkan sistem nilai dan perspektif ilmiah dan rasional sebagai lawan dari nilai-nilai dan pandangan hidup lama, pasrah dan menyerah pada nasib, ketiadaan keberanian menanggung resiko. Semua itu telah diajarkan oleh sekolah-sekolah sejak proses modernisasi dari perubahan sosial. Dengan menggunakan cara-cara berpikir ilmiah, cara-cara analisis dan pertimbangan-pertimbangan rasional serta kemampuan evaluasi yang kritis, orang akan cenderung berpikir objektif dan lebih berhasil dalam menguasai alam sekitarnya.

8. Fungsi difusi budaya

Lembaga-lembaga pendidikan selain berfungsi sebagai penghasil nilai-nilai budaya baru juga berfungsi sebagai difusi budaya (*cultural diffusion*). Kebijakan-kebijaksanaan sosial yang kemudian diambil tentu berdasarkan pada hasil budaya dan difusi budaya. Sekolah-sekolah tersebut bukan hanya menyebarkan penemuan-penemuan dan informasi-informasi baru tetapi juga menanamkan sikap-sikap, nilai-nilai dan pandangan hidup baru yang semuanya itu dapat memberikan kemudahan-kemudahan serta memberikan dorongan bagi terjadinya perubahan sosial yang berkelanjutan.

9. Fungsi peningkatan sosial

Peningkatan sosial yang dimaksud dalam hal ini adalah perubahan status sosial individu dan masyarakat. Di dalam masyarakat orang yang berpendidikan lebih disegani dari pada orang yang tidak berpendidikan. Hal ini dikarenakan tingkat keilmuan dan kerendahan hati seseorang selama proses pendidikan memberikan pengaruh signifikan dalam masyarakat, baik ketika berinteraksi sosial, menjalankan norma-norma masyarakat, maupun penentuan

kebijakan dalam masyarakat. Pengaruh individu tersebut akan berefek kepada masyarakat yang lebih beradab.

10. Fungsi modifikasi sosial

Pengaruh dan upaya pengembangan berpikir kritis dapat memberikan modifikasi (perubahan) hierarki sosial ekonomi. Oleh karena itu pengembangan berpikir kritis bukan saja efektif dalam pengembangan pribadi seperti sikap berpikir kritis, juga berpengaruh terhadap penghargaan masyarakat akan nilai-nilai manusiawi, perjuangan kearah persamaan hak-hak, baik politik, sosial, ekonomi. Bila dalam masyarakat tradisional lembaga-lembaga ekonomi dan sosial didominasi oleh kaum bangsawan dan golongan elite yang berkuasa, maka dengan semakin pesatnya proses modernisasi, tatanan-tatanan sosial ekonomi dan politik tersebut diatur dengan pertimbangan dan penalaran-penalaran yang rasional. Oleh karena itu, timbullah lembaga-lembaga ekonomi, sosial dan politik yang berasaskan keadilan, pemerataan, dan persamaan. Adanya strata sosial dapat terjadi sepanjang diperoleh melalui cara-cara objektif dan keterbukaan, misalnya dalam bentuk mobilitas vertikal yang kompetitif.³⁰

³⁰ Wuradji, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: P2LPTK, 1988), hal. 31-42

Daftar Pustaka

- Abdulsyani.1992. *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ahmadi, Abu, et. Al.1991. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Andrian, Charles F.1992. *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta : Tiara Wacana
- Azra, Azzumardi .2001. *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Ciputat : Kalimah
- Badruddin, Kemas.2009. *Filsafat Pendidikan, Analisis Pemikiran Syed Naquib al-Attas*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Bahesyti, Muhammad Husaini dan Jawad Bahonar.2003. *Intisari Islam Kajian Komprehensif tentang Hikmah Ajaran Islam*, (terj.) Ilyas Hasan dari judul *Philosophy of Islam*. Jakarta : Lentera Basritama. Cet. I
- Ballantine , Jeanne H.1983. *The Sociology of Education*. New Jersey : Prentice Hall
- Brookover , Wilbur B. 1995. *Sociological Education*. New York : American Book Company
- Departemen Pendidikan Nasional .2005. *Peraturan Pemerintah Nomer 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009 menuju Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang 2025*. Jakarta : Depdiknas
- Khaldun, Ibn .2008. *Muqaddimah*. Jakarta : Pustaka Firdaus
- Linton , Ralph.1963. *The Study of Man : An Introduction*. New York : Crofts Inc
- Maclver, R.M. dan Charles H.Page.1961. *Society: An Introductory Analysis*. New York : Macmillan
- Maksum, Ali.2016. *Sosiologi Pendidikan*. Malang : Madani
- Mandzur, Ibn.1960. *Lisan al-Árabi* entri a-da-ba dan Ibrahim Mustofa (dkk) *al-Mu'jam al-Wasith* entri adaba. Istanbul : Maktabah al-Islamiyah
- Muthahhari , Murtadha.1996. *Masyarakat dan Sejarah*, (terj.) M.Hashem dari judul asli *Society and History*, Bandung : Mizan. Cet.I
- Nata, Abuddin.2013. *Pemikiran Pendidikan Islam dan Barat*. Depok : PT. Rajagrafindo Persada, Cet.II.
- Soekanto, Soerjono. 1987. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Press

Spoerwadarminata, W.J.1991. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Cet.XII
Quraish, H.M. Shihab.1996. *Wawasan al-Qurán*. Bandung : Mizan, cet.II

Susanto, Astrid S.1979. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Bandung : Binacipta

Wuradji. 1988. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: P2LPTK

Zibakalam, Fatemah –Mofrad. *Ibn Sina's Philosophy of Education and its Aplication to Modern Muslim Educational System*